

**EFEKTIVITAS PERAN KPUD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN SOSIALISASI DI
KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT**

MUH. ABIMARSYA HASANUDDIN
NPP 29.1946

*Asdaf Provinsi Sulawesi Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email :
abimarsyahasanuddin@gmail.com

ABSTRACT

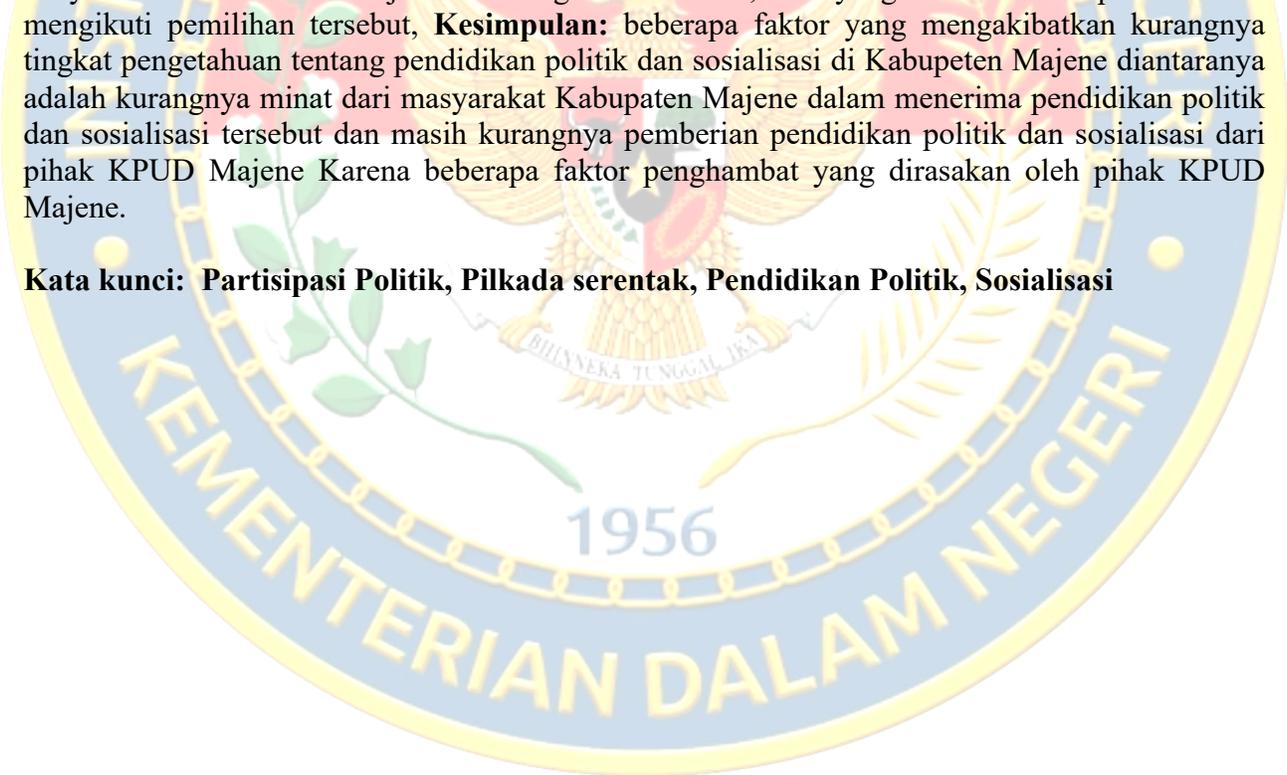
Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research). During the simultaneous regional elections, the election of the Regent and Deputy Regent for the 2020-2025 period in Majene Regency, the level of community participation in Majene Regency was quite successful even though at the time of the Pilkada it was still in a COVID-19 pandemic condition, as evidenced by the percentage level of voter turnout in Majene Regency. exceeding the target of the Provincial KPU, which is 77.6%, even exceeding the target of the Central KPU, which is 77.5%. However, among the people of Majene there is still a lack of knowledge about Political Education and Socialization. This is an important phenomenon to be discussed, therefore it is necessary to do a research.***Objective:** *To find out whether political education and socialization of the implementation of elections have been effective in increasing public political participation in Majene Regency.***Method:** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation***Result** *The level of public political participation in the 2020 simultaneous regional elections, especially in Majene Regency, has increased, even exceeding the targets of the Provincial KPU and the targets of the Central KPU. However, when the author conducted interviews with several people, that the level of political understanding of the community was still lacking, they tended to use their voting rights only to participate in these activities, some were afraid or forced to participate in the election.,***Conclusion:** *Several factors resulted in the lack of knowledge about political education and socialization in Majene Regency, including the lack of interest from the Majene Regency community in receiving political education and socialization and the lack of political education and socialization from the Majene KPUD. Majene KPUD.*

Keywords: *Political Participation, Simultaneous Regional Election, Political Education, Socialization*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Pada Pelaksanaan Pemilihan Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025 di Kabupaten Majene tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Majene terbilang cukup sukses meskipun pada saat pelaksanaan Pilkada tersebut masih dalam kondisi pandemi covid-19, terbukti dengan tingkat persentase partisipasi pemilih di Kabupaten Majene telah melampaui target KPU Provinsi yaitu 77,6% bahkan melampaui target dari KPU Pusat yaitu 77,5%. Akan tetapi di kalangan masyarakat Majene masih kurangnya pengetahuan tentang Pendidikan Politik dan Sosialisasi. Hal tersebut merupakan suatu fenomena yang penting dibahas, oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian. **Tujuan** Untuk mengetahui sudah efektifkah pendidikan politik dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Majene. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2020 khususnya di Kabupaten Majene telah mengalami peningkatan, bahkan telah melampaui target dari KPU Provinsi maupun target dari KPU Pusat. Akan tetapi penulis ketika melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat, bahwa tingkat pemahaman politik masyarakat tersebut masih dapat dikatakan kurang, mereka cenderung menggunakan hak pilihnya hanya untuk ikut-ikutan saja dalam kegiatan tersebut, ada yang takut atau terpaksa dalam mengikuti pemilihan tersebut, **Kesimpulan:** beberapa faktor yang mengakibatkan kurangnya tingkat pengetahuan tentang pendidikan politik dan sosialisasi di Kabupaten Majene diantaranya adalah kurangnya minat dari masyarakat Kabupaten Majene dalam menerima pendidikan politik dan sosialisasi tersebut dan masih kurangnya pemberian pendidikan politik dan sosialisasi dari pihak KPUD Majene Karena beberapa faktor penghambat yang dirasakan oleh pihak KPUD Majene.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Pilkada serentak, Pendidikan Politik, Sosialisasi



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu dari cita-cita bangsa Indonesia ialah menciptakan negara yang bersifat demokratis. Pemilihan umum merupakan wadah untuk berdemokrasi serta bentuk perwujudan terhadap kedaulatan rakyat agar dapat menciptakan wakil rakyat atau pemimpin yang berkualitas, aspiratif, dan juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Penyelenggaraan Pemilihan Umum berpedoman terhadap asas mandiri, kepastian dalam hukum, jujur adil, tertib penyelenggaraan. Partisipasi Politik dapat diartikan sebagai suatu peran masyarakat dalam proses pemerintahan, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung, memang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam suatu negara (Tia subekti, 2014). Dalam memilih seorang tokoh pemimpin negara maupun daerah secara langsung ialah situasi atau keadaan yang sangat menentukan bagi suatu negara, oleh karenanya mesti diikuti dengan partisipasi politik masyarakat yang tinggi. Pemilih Pemula saat berada pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) seringkali menjadi bagian yang istimewa, serta menimbulkan guncangan serta menjanjikan secara kuantitas. Pemilih Pemula begitu rentan tergoyahkan oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu, apalagi dari orang terdekat mereka misalnya kerabat mereka sendiri, yaitu dari orang tua sampai keluarga terdekat mereka, dan juga yang lebih memprihatinkan lagi ialah masih kurang pemahannya pemilih pemula akan proses penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan tersebut. Upaya terhadap pengedukasian masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif serta dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dapat dilaksanakan melalui pendidikan politik.

Strategi tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan KPU sehingga masyarakat benar-benar dapat mengetahui apa itu Pemilu, melainkan pemberian petunjuk teknis, para masyarakat jg perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana memberikan hak suara mereka dengan sebaik-baiknya, serta bukan karena adanya pengaruh hal lain yang tidak memberikan suatu keuntungan terhadap masyarakat itu sendiri. Sosialisasi Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dapat menjadi acuan terhadap sarana pendidikan politik agar dapat menjadikan partisipasi politik masyarakat yang bermutu. Penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Umum, KPU atau KPUD di Kabupaten/Kota memiliki wewenang serta tugas yaitu : a) merencanakan, menyelenggarakan, serta memimpin segala tahapan kegiatan pemilihan umum. Kabupaten Majene adalah salah satu Kabupaten dari 6 Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi barat, yang terdiri dari 8 Kecamatan dan, 82 Desa/Kelurahan. 8 Kecamatan terdiri dari Kecamatan

Banggae, Kecamatan Banggae timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda. Yang baru baru ini telah melaksanakan Pemilukada serentak pada tahun 2020 yang berhasil dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 02 yaitu Andi Ahmad Syukri dan Arismunandar (AST-ARIS). Dengan periode masa jabatan 2020-2025. Berdasarkan data dari komisi pemilihan umum daerah (KPUD) pada tahun 2015 dan tahun 2020 pada pilkada serentak, pada tahun 2015 berdasarkan fakta bahwa daftar jumlah pemilih sebanyak 109.834 orang pemilih, sedangkan jumlah seluruh pengguna hak pilih tersebut sebanyak 91.002 orang yang memilih.

Menurut data diatas sebanyak 15.092 orang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun 2020, serta data jumlah pemilih pemula pada Pilkada serentak tahun 2020 itu sebanyak 7.517 orang atau sekitar 6,5%. Dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2015 pada Pilkada serentak, sekitar 17% masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. masih adanya masyarakat khususnya di Kabupaten Majene yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam berpartisipasi terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Majene. Alasannya karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sangat pentingnya partisipasi mereka ketika diadakannya Pilkada serentak, karena kebanyakan dari masyarakat sendiri belum sepenuhnya mengetahui manfaat Pemilu. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya masyarakat tidak menggunakan hak memilihnya dalam memilih.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penulis akan mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PERAN KPUD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN SOSIALISASI DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT.”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada Pelaksanaan Pemilihan Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025 di Kabupaten Majene tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Majene terbilang cukup sukses meskipun pada saat pelaksanaan Pilkada tersebut masih dalam kondisi pandemi covid-19, terbukti dengan tingkat persentase partisipasi pemilih di Kabupaten Majene telah melampaui target KPU Provinsi yaitu 77,6% bahkan melampaui target dari KPU Pusat yaitu 77,5%. Akan tetapi di kalangan masyarakat Majene masih kurangnya pengetahuan tentang

Pendidikan Politik dan Sosialisasi. Hal tersebut merupakan suatu fenomena yang penting dibahas, oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Fety novianti, Erna actavia, berjudul “penelitian Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak barat”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni hal yang mendorong terjadinya politik pemilih pemula di Kecamatan Pontianak barat dalam Pilpres 2014 ialah, pertama kepedulian terhadap nasib bangsa, kedua kesadaran politik dalam berpartisipasi, ketiga rasa ingin tahu, keempat tokoh seorang pemimpin, kelima praktek politik uang.

Kedua, Ilham(2018), berjudul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa” .menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran KPU Kabupaten Gowa selaku Penyelenggara Pemilu dengan memberikan edukasi politik terhadap masyarakat serta memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas di tingkat daerah.

Ketiga, Dewi sri lestari (2019), berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang” .menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang dalam meningkatkanPartisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 dapat dilihat dari tiga strategi yaitu, pertama bagian formulasi dan sasaran jangka panjang, kedua bagian pemilihan tindakan bagian alokasi sumber daya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sudah efektifkah pendidikan politik dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Majene
2. Untuk mengetahui mekanisme sosialisasi dan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPUD
3. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh KPUD dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya

II. METODE

Sugiyono (2016: 232) dalam bukunya berjudul Metodologi Penelitian bahwa “metode penelitian kualitatif pemerintahan, data didapat dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi terfokus dan dimantapkan dengan triangulasi.” . Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pendidikan Politik Dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Majene

Efektivitas sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Majene merupakan suatu tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang membuktikan sejauh mana tujuan atau sasaran tersebut telah tercapai. Dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu tersebut tentunya KPUD Kabupaten Majene mempunyai beberapa metode dalam melaksanakan salah satu tugasnya tersebut agar di dalam melakukan pemberian pendidikan politik dan sosialisasi penyelenggaraan tersebut dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pihak KPUD Kabupaten Majene telah berusaha dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Majene melalui pendidikan politik dan sosialisasi agar masyarakat sebagai pemilih dapat mempertimbangkan sisi kualitas calon yang akan dipilih. Peran KPUD Majene dalam

pemberian pendidikan politik dan sosialisasi masih kurang efektif Pemberian sosialisasi serta pendidikan politik terhadap masyarakat atau pemilih sangatlah penting karena dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Majene, sehingga para masyarakat di Kabupaten Majene dapat mengetahui tentang tahapan dan program Pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan dalam setiap tahapan pemilu. Berikut beberapa topik yang akan disosialisasikan oleh KPUD Kabupaten Majene terhadap masyarakat pemilih.

A. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada kita sering mendengar kata kode etik penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada yang bermartabat dapat dimulai dengan penyelenggara pemilu atau pilkada yang menjunjung tinggi etika. Dalam pasal 1 ayat 4 peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu merumuskan bahwa kode etik penyelenggara ialah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut dan tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Kode etik Penyelenggara Pemilu sangatlah penting dalam penyelenggaraan Pemilu agar dapat menciptakan Pemilu atau Pilkada yang bermartabat. Karena etika memiliki arti standar nilai yang sangat tinggi. Seseorang penyelenggara pemilu tidak hanya harus peka terhadap hukum tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap suatu etika.

B. Persyaratan Dan Tata Cara Pengajuan Calon

Selanjutnya pada bagian ini peneliti akan memaparkan tentang persyaratan dan tata pengajuan calon. Pada bagian ini merupakan salah bagian yang sangat penting di sosialisasikan kepada masyarakat agar para masyarakat atau pemilih dapat mengetahui persyaratan apa saja dan bagaimana tata cara mengajukan calon yang dilakukan dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Majene. dalam mengajukan calon kepala daerah para calon yang berasal dari masyarakat harus mengetahui dengan baik dan benar persyaratan dan tata cara pengajuan calon agar dalam melakukan pendaftaran calon sebagai kepala daerah dapat berjalan dengan lancar.

C. Persyaratan Pemilih

Dalam bagian ini penulis akan memaparkan tentang pentingnya memberikan sosialisasi tentang syarat sebagai pemilih kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui syarat-syarat apa saja agar para masyarakat sudah dapat dikatakan sebagai pemilih di suatu daerah khususnya pemilih di Kabupaten Majene. Sebelum penulis memaparkan tentang apa saja syarat agar seseorang dapat dikatakan sebagai pemilih, menjadi seorang pemilih juga memiliki beberapa syarat agar dapat tergolong sebagai seorang pemilih di suatu daerah tersebut.

D. Penetapan DPS dan DPT

Dalam menentukan DPS itu tidaklah semudah yang difikirkan karena pada kenyataannya harus melalui proses yang panjang karena pihak KPU harus berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri yang telah menyediakan dan menyerahkan data penduduk potensi pemilih pemilu. Dalam data penduduk potensi pemilih tersebut memuat NIK, nama, tanggal lahir jenis kelamin dan alamat warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih.

Pada tahun 2015 jumlah pemilih dari 8 Kecamatan di Kabupaten Majene. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 53.476 pemilih sedangkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 56.358 pemilih. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pemilih dari 8 Kecamatan di Kabupaten Majene. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 57.509 pemilih sedangkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 59.896 pemilih. Jadi total keseluruhan jumlah pemilih ditahun 2015 adalah sebanyak 117.405 pemilih. Jumlah partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2015 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Terkait hal tersebut meningkatnya partisipasi di Tahun 2015-2020 tidak terlepas dengan adanya penambahan partisipasi politik dari golongan pemilih pemula. Oleh karena itu khususnya dari pihak KPUD Majene harus lebih meningkatkan salah satu tugasnya yaitu memberikan pendidikan politik terhadap seluruh lapisan masyarakat yang tergolong pemilih agar dapat menjadi pemilih yang cerdas.

E. Menyiapkan Akreditasi program bagi penyandang Disabilitas

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang bagaimana peran KPUD Majene dalam menyiapkan akreditasi program bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Majene. Dalam hal tersebut pihak KPUD Majene tidak boleh memandang sebelah mata terhadap penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Mejene karena suara mereka juga merupakan suara dari rakyat serta harus dapat menyiapkan beberapa program agar penyandang disabilitas di Kabupaten Majene tersebut ikut berpartisipasi serta dapat menggunakan hak pilihnya. suara dari

penyandang disabilitas sangatlah penting dan kedudukan mereka sama dengan masyarakat pada umumnya. Kita tidak boleh meremehkan suara mereka karena suara mereka juga sebagai penentu nasib Kabupaten Majene kedepannya. Pihak KPUD Majene sendiri pada umumnya sudah memberi perhatian terhadap beberapa masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Majene terbukti dengan Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan program door to door langsung ke masyarakat.

F. Pelaksanaan pemilu atau pilkada yang damai

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan bahwasanya bagaimana peran KPUD Majene dalam menciptakan suasana Pemilu atau Pilkada yang damai. Salah satu tolak ukur dikatakan berhasilnya pelaksanaan Pemilu atau Pilkada ialah pelaksanaan Pilkada tersebut diselenggarakan dengan damai. Dalam menciptakan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada yang damai seluruh elemen baik itu dari masyarakat maupun pihak pemerintah harus bekerja sama dalam menciptakan hal tersebut.

Tugas dalam menciptakan kondisi Pemilu atau Pilkada yang damai bukan hanya KPU akan tetapi pihak masyarakat maupun partai politik juga harus ambil andil dalam menciptakan kondisi tersebut. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara serta pedoman masyarakat dalam bermasyarakat sehari-hari serta diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meskipun berbeda-beda kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu semestinya kita lebih menghayati serta melaksanakan segala bentuk pesta demokrasi baik itu Pemilu atau Pilkada dengan tindakan yang damai, santun, cerdas, serta sehat untuk kesejahteraan masyarakat.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Fety novianti, Erna actavia, berjudul “penelitian Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak barat”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni hal yang mendorong terjadinya politik pemilih pemula di Kecamatan Pontianak barat dalam Pilpres 2014 ialah, pertama kepedulian terhadap nasib bangsa, kedua kesadaran politik dalam berpartisipasi, ketiga rasa ingin tahu, keempat tokoh seorang pemimpin, kelima praktek politik uang.

Ilham(2018), berjudul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa” . Adapun temuan hasil

penelitiannya yaitu peran KPU Kabupaten Gowa selaku Penyelenggara Pemilu dengan memberikan edukasi politik terhadap masyarakat serta memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas di tingkat daerah.

Dewi sri lestari (2019), berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang” . Adapun temuan hasil penelitiannya yaitu strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 dapat dilihat dari tiga strategi yaitu, pertama bagian formulasi dan sasaran jangka panjang, kedua bagian pemilihan tindakan bagian alokasi sumber daya.

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni beberapa faktor yang mengakibatkan kurangnya tingkat pengetahuan tentang pendidikan politik dan sosialisasi di Kabupeten Majene diantaranya adalah kurangnya minat dari masyarakat Kabupaten Majene dalam menerima pendidikan politik dan sosialisasi tersebut dan masih kurangnya pemberian pendidikan politik dan sosialisasi dari pihak KPUD Majene Karena beberapa faktor penghambat yang dirasakan oleh pihak KPUD Majene.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis terkait dengan efektifias peran KPUD Kabupaten Majene dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan poltik dan sosialisasi di Kabupaten Majene, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2020 khususnya di Kabupaten Majene telah mengalami peningkatan, bahkan telah melampaui target dari KPU Provinsi maupun target dari KPU Pusat. Akan tetapi penulis ketika melakukan wawancara terhadap beberapa msasyarakat, bahwa tingkat pemahaman politik masyarakat tersebut masih dapat dikatakan kurang, mereka cenderung menggunakan hak pilihnya hanya untuk ikut-ikutan saja dalam kegiatan tersebut, ada yang takut atau terpaksa dalam mengikuti pemilihan tersebut, bahkan terdapat masyarakat yang hanya menggunakan hak pilihnya karena di iming-imingi oleh beberapa oknum dengan memberikan sejumlah uang. Oleh karena itu dengan tingkat partisipasi yang tinggi ini harus diiringi dengan tingkat pengetahuan atau pemahaman masyarakat terkait dengan pengetahuan tentang politik, oleh karena itu agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya

dengan baik dan benar serta terbentuk menjadi pemilih yang cerdas dan bijak, KPUD Majene harus dapat memberikan pendidikan politik dan sosialisasi dengan sebaik-baiknya. Serta masyarakat Majene juga harus menghilangkan rasa apatis terhadap kegiatan yg diberikan oleh pihak KPUD Majene terkait kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi agar para masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan pendidikan dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak KPUD Majene.

1. Adapun manfaat dari pemberian Pendidikan Politik dan Sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Majene adalah terbangunnya kesadaran politik warga terhadap pelaksanaan pemilihan, masyarakat akan menjadi pemilih yang baik atau cerdas karena meskipun masyarakat sadar akan menggunakan hak pilihnya akan tetapi belum cerdas dalam menggunakan hak pilihnya akan berakibat dapat diiming-imingi uang atau masyarakat tersebut akan mudah untuk di sogok, serta masih adanya dikalangan masyarakat khususnya di kabupaten majene yg menggunakan money politik dalam berkampanye.
2. Dalam melaksanakan salah satu tugas dari KPUD yaitu memberikan pendidikan politik dan sosialisasi terhadap beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak KPUD Majene yaitu Beberapa akses yang sangat menghambat beberapa kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi politik yaitu baik akses transformasi berupa jalanan, akses informasi berupa jaringan. Karena daerah Majene ini masih ada daerah yang akses jalan dan jaringannya belum layak sehingga dalam pemberian sosialisasi dalam bentuk tatap muka dan daring itu masih sulit kami lakukan. Selanjutnya masih adanya masyarakat yang apatis terhadap kesadaran politik mereka sehingga mereka tidak menerima atau mendapatkan pendidikan politik dan sosialisasi. Meskipun hal-hal tersebut menjadi kendala akan tetapi kami dari pihak KPUD Majene selalu membuat strategi, maka salah satu strategi dalam mengatasi hal tersebut dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat pesat dikalangan masyarakat yaitu melalui media sosial dengan melakukan kegiatan-kegiatan melalui media sosial baik itu model talk show, podcast, sosialisasi melalui akun media sosial (facebook dan Instagram KPUD kabupatenMajene).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Gibson dalam Sumaryadi saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada

lokasi serupa berkaitan Dengan Efektivitas Peran Kpud Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Melalui Pendidikan Politik Dan Sosialisasi Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Kpud Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Baratserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, MIRIAM, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* . (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010)
- Efriza, *Political Explore* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Kartini Kartono, *Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa* (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Moleong, Lexy, J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya., 2013)
- Ndraha, Talizudulu, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* (Bandung: Rineka Cipta, 2011)
- Novianty, Fety, and Erna Octavia, 'MENUMBUHKAN PARTISIPASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT', 5.2 (2018), 293–303